



Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2026.

Laporan ini menyajikan kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) telah berhasil dicapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, 20 Februari 2026

Kepala Dinas



Amad Hidayat, S.STP., M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”** dan misi ketiga yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**.

Seiring dengan harapan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- VISI** : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**
- MISI 1** : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- TUJUAN 1.1** : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
- SASARAN 1.1.1** : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
- MISI 3** : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**
- TUJUAN 3.1** : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
- SASARAN 3.1.1** : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- SASARAN 3.1.2** : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
- SASARAN 3.1.3** : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP DPMPSTSP	Tanpa Satuan	A (80)	BB (79,46)*	77
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	97	92	95
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	350 responden	350 responden	91,68
		Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rupiah	925 M	930.425.963.348	101
Rata-rata capaian (%)							91,17

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata capaian sebesar 91,17%. Capaian nilai AKIP DPMPTSP mencapai 77% dengan kategori baik, sementara kematangan inovasi perangkat daerah mencapai 95%. Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 91,68% dari target begitu juga realisasi investasi PMA/PMDN melampaui target dengan capaian 101%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dan investasi daerah berada pada kategori baik dan cenderung melampaui target yang ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dapat lebih maksimal.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien pada tahun berikutnya serta sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 20 Februari 2026

Kepala Dinas



Amad Hidayat, S.STP., M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	7
1.5. Landasan Hukum.....	8
1.6. Sistematika Penyusunan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	11
2.1.1. Visi	11
2.1.2. Misi.....	11
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	12
2.2. Rencana Kinerja	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja.....	20
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	21
3.3. Capaian Kinerja.....	23
3.4. Realisasi Anggaran	49
BAB IV.....	56
PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	iv
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2	Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.3	Landasan Hukum Penyusunan LKj pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
Tabel 2.1	Daftar Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
Tabel 2.2	Daftar Rasionalisasi/Perubahan Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.....	14
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16
Tabel 2.5	Sasaran Stratgis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	16
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.7	Program dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	21
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	26
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Tahun 2025...	26
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Perangkat Daerah.....	32

Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir	33
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	34
Tabel 3.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	38
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	39
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	40
Tabel 3.15	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	44
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	44
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	46
Tabel 3.19	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Tahun 2025	46
Tabel 3.20	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
Tabel 3.21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	23
Grafik 3.2	Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 s.d 2025.....	25
Grafik 3.3	Tren Capaian Kinerja pada Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	34
Grafik 3.4	Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Tahun 2023 s.d. 2025.....	39
Grafik 3.5	Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 s.d 2025	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya

LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan LKj

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggara pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menyajikan informasi kinerja secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025.

B. Tujuan Penyusunan LKj

Adapun tujuan penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mencakup al-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan H. Agus Salim Painan, Kecamatan IV Jurai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang melaksanakan urusan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan pada urusan pelayanan perizinan dan urusan penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangk aurusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a) sekretariat;
- b) urusan pelayanan perizinan; dan
- c) urusan penanaman modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total ASN dan Non ASN per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri atas:

- a. PNS sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri atas 5 (lima) orang laki-laki dan 13 (tiga belas) orang perempuan.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan.

Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						
	PNS		PPPK		PPPK Paruh Waku		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Total
2025	5	13	1	1	5	5	30
Jumlah	5	13	1	1	5	5	30

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh perempuan. Secara keseluruhan persentase komposisi perempuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar 63% dan laki-laki sebesar 37%.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- a. PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 (delapan) orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 (sembilan) orang, pendidikan Diploma sebanyak 1 (satu) orang;
- b. PPPK dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 2 (dua) orang;
- c. PPPK PW dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 (enam) orang dan pendidikan SMA sebanyak 4 (empat) orang.

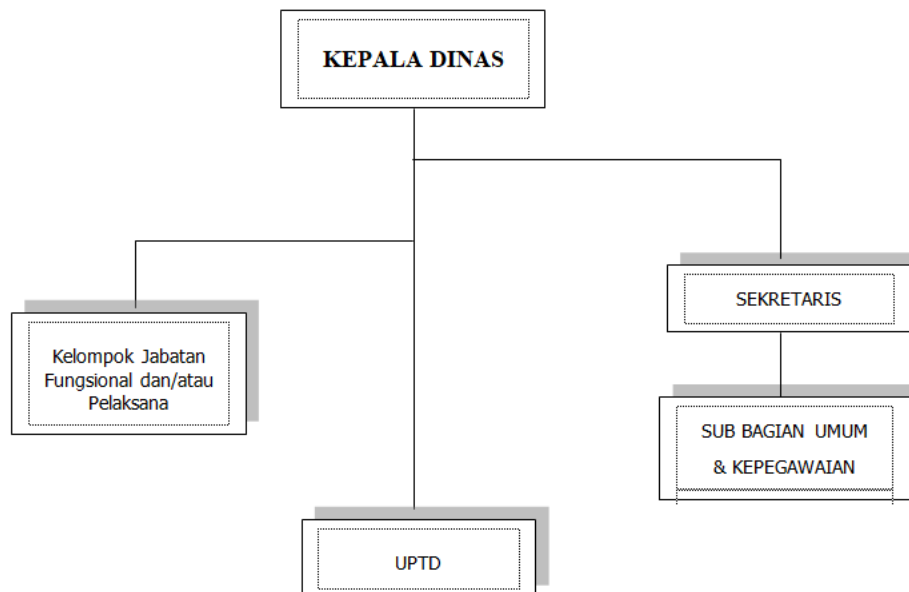
Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN						Total
	PNS			PPPK	PPPK Paruh Waktu		
	S2	S1	Diploma	SMA	S1	SMA	
2025	8	9	1	2	6	4	30
Jumlah	8	9	1	2	6	4	30

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:



1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar-benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Investasi yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (*evidence based planning*). Investasi Inovatif adalah investasi yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Investasi berbasis bukti merupakan pendekatan proses investasi dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.
- 2) Meningkatkan kualitas data investasi akan menentukan dalam menghasilkan dokumen investasi.
- 3) Meningkatkan peran DPMPTSP dalam Peningkatan Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih merupakan permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun, namun telah mengalami proses perbaikan dan diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2025 nanti dapat terselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1. Percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan, hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 89

tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dimana akan tergabung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang akan melakukan pelayanan publik.

2. Jumlah sumber daya manusia belum memadai untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan .
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses menarik investor belum optimal.
4. Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disediakan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan.
5. Masih minimnya kajian potensi dan peluang investasi di daerah.

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah secara akuntabel. Oleh karena itu, daftar landasan hukum penyusunan LKj disajikan pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Landasan Hukum Penyusunan LKj pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Jenis Peraturan	Nomor dan Tahun	Tentang	Keterangan
1	Undang-Undang	UU. No 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPMPTSP
2.	Undang-Undang	UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah	Mengatur kewenangan pemerintah daerah dan perangkat daerah
3.	Peraturan Presiden	Perpres No. 29 Tahun 2014	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Landasan utama

			Pemerintah (SAKIP)	penyusunan LKj
4.	Peraturan Menteri PanRB	PermenPANRB No. 53 Tahun 2014	Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja	Pedoman teknis penyusunan LKjIP
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Permendagri No. 86 Tahun 2017	Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sinkronisasi LKjIP dengan dokumen perencanaan
6.	Peraturan Menteri PanRB	PermenPANRB No. 88 Tahun 2021	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dasar evaluasi kinerja instansi
7.	Peraturan Bupati Pesisir Selatan	Perbup Pesisir Selatan tentang Renstra DPMPTSP	Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dasar indikator dan target kinerja DPMPTSP
8.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Perda tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Acuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II – Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;

- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa Misi Kesatu dan Misi Ketiga berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan; dan
- 2) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Kajian Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026. Kajian yang dilakukan adalah mereviu penggunaan indikator utama dan indikator kinerja perangkat daerah terhadap RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 050/0034/PPEPD-Bapedalitbang/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rasionalisasi Target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan penyusunan pohon kinerja Perangkat Daerah, rasionalisasi Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Dari hasil rasionalisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Daftar Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Nilai Investasi PMA dan PMDN	200,000,000,000	310,000,000,000	372,000,000,000	446,400,000,000	536,680,000,000	642,816,000,000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	84%	85%	85%	85%
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Daftar Rasionalisasi/Perubahan Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	200,000,000,000	310,000,000,000	600,000,000,000	625,000,000,000	650,000,000,000	670,500,000,000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	82%	84%	84%	85%
3	Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPSTSP	B	B	B	B	B	B
		Nilai AKIP DPMPSTSP	A	A	A	A	A	A
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan rasionalisasi ada perubahan pada sasaran strategis poin 1, yaitu Investasi PMA dan PMDN karena memperhatikan capaian realisasi di tahun sebelumnya sehingga dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis Investasi PMA dan PMDN. Perubahan selanjutnya juga terjadi pada poin 3 yaitu Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja karena menyesuaikan dengan Cascading terbaru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan hasil rasionalisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pesisir Selatan	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Nilai Investasi PMA dan PMDN	200,000,000,000	310,000,000,000	372,000,000,000	446,400,000,000	536,680,000,000	642,816,000,000
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	84%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Rencana Kinerja

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai secara rasional (*Achievable*), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (*Relevant*), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (*Time-bound*). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Spesific/Spesifik (S); indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) Measurable/Terukur (M); dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- 3) Achievable (A); dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) Result-Oriented/Relevant (R); terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.

- 5) Time-Bound (T); memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Analisis Situasi:

Pahami kondisi saat ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

- 2) Penetapan Tujuan:

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan membimbing penetapan target.

- 3) Tujuan Strategis :

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

- 4) Indikator Kinerja:

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

- 5) Target Spesifik:

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

- 6) Rencana Aksi:

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

- 7) Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan

RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi dalam rangka Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Berdaya Saing	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89,4)	A (80)
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	97	97
			Nilai Pelayanan Publik	Tanpa Satuan	91% (350 responden)	90% (350 responden)
		Meningkatnya Investasi Swasta dan Masyarakat	Nilai Investasi UMK dan Non UMK	Milyar Rupiah	925 M	925 M

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dukungan program/kegiatan sangat perlu diperhatikan seperti tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Sasaran Stratgis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Perhitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

				a
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{jumlah responden yang merasa puas}}{\text{jumlah responden yang mengurus izin}} \times 100$	Program Pelayanan Penanaman Modal
4	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Jumlah investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas Tahun Evaluasi + Jumlah Investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas Tahun Sebelumnya (Juta)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (89,4)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	97
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91% (350 Responden)
4	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	925.000.000.000

Dilihat dari tabel 2.6 di atas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai AKIP Perangkat Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, target dihitung berdasarkan skor tahun sebelumnya dan ditargetkan naik dengan penambahan inovasi serta perbaikan kualitas inovasi. Upaya pencapaian target dilakukan melalui penilaian inovasi berdasarkan pemenuhan kriteria yang diinput pada aplikasi IGA.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil penilaian responden terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha, dengan sumber data yang diperoleh dari pengolahan kuesioner serta

kotak tingkat kepuasan pemohon yang tersedia di ruang Front Office;
dan

- 4) Penetapan target Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat didasarkan pada akumulasi realisasi investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara triwulanan melalui aplikasi OSS Pengawasan (LKPM), dengan sumber data berupa laporan jumlah investor per tahun.

Tabel 2.7

Program dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (89,4)	3.145.900.220
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	97	3.145.900.220
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	925.000.000.000	27.818.550
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			16.300.950
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	49.501.398
Jumlah				3.269.521.118

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

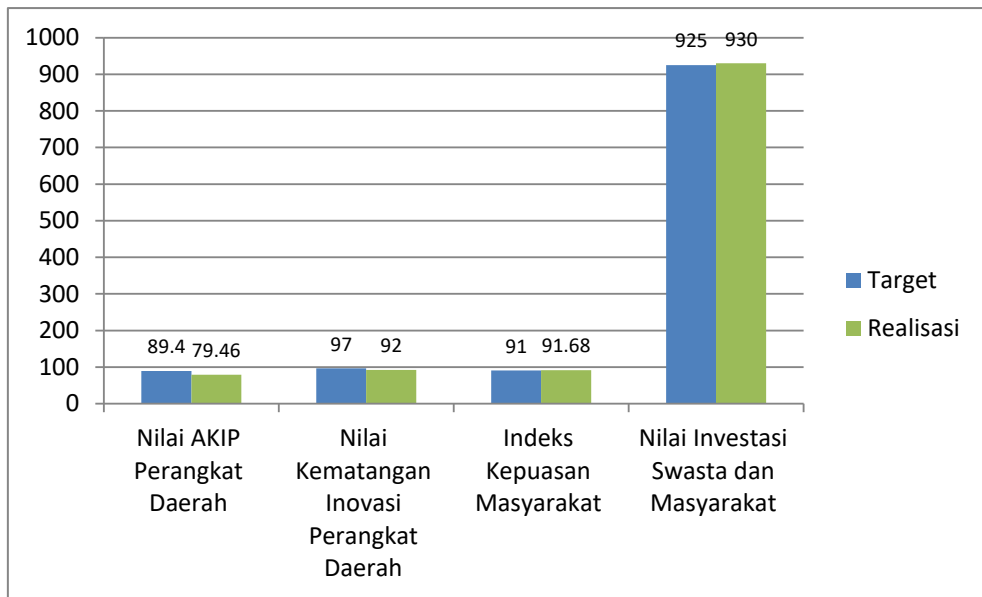
No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2025		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (89,4)	BB (79,46)	77
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	97	92	95
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rupiah	925 M	930.425.963.348	101
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tanpa Satuan	91% (350 responden)	350 responden	91,68

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 ini ada 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yaitu:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target A (89,4). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah BB (79,46) atau sebesar 77% dengan predikat baik. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini memakai nilai evaluasi tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret tahun 2026.
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target 97. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 92 atau sebesar 95% dengan predikat sangat baik.
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 350 responden. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 91,68%.
- 4) Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat dengan target 925 Milyar Rupiah. Capaian indikator dari nilai investasi swasta dan masyarakat ini adalah sebesar Rp930.425.965.348,- atau sebesar 101%.

Capaian rata-rata ke 4 (empat) indikator kinerja tersebut di atas adalah sebesar 91% dengan predikat sangat baik. Grafik capaian kinerja per indikator dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini:

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025



3.3. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 di atas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN STRATEGIS 1

“Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Tanpa satuan	A (89,4)*	BB (79,46)*	77%
Rata-rata capaian (%)						77%

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

b) Membandingkan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja AKIP tahun 2023-2025, dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

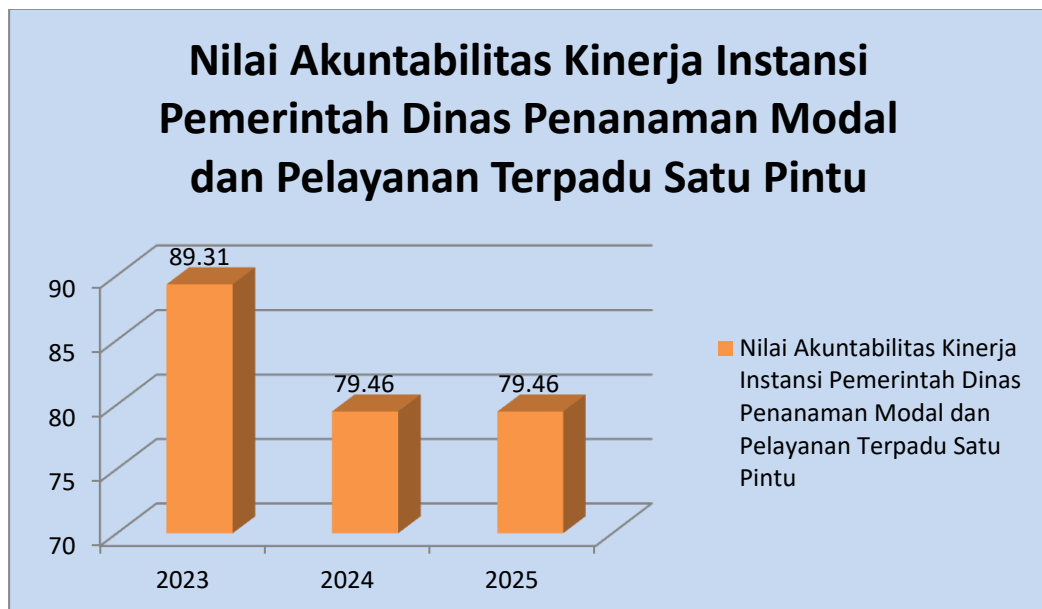
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	A (89,31)	BB (79,46)	BB (79,46)*

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

Pada grafik 3.2 di bawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 s.d 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.2
Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 s.d 2025



Pada grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2023 s.d 2025 mengalami

penurunan signifikan menjadi 79,46. Adapun nilai tahun 2025 masih menggunakan capaian tahun 2024 karena hasil penilaian tahun 2025 belum tersedia, sehingga bersifat sementara dan akan diperbarui setelah nilai resmi diterbitkan.

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	(BB)* 79,46	(A) 90	77	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	DPMPTSP Kab. Pesisir Selatan	DPMPTSP Provinsi Sumbar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Tanpa Satuan	(BB)* 79,46	(A) 80,69

	Berkinerja	Instansi Pemerintah			
--	------------	------------------------	--	--	--

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai AKIP adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil.
- Adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan, seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, serta LKjIP yang semakin selaras.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga capaian kinerja dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik
- Dukungan pembinaan dan evaluasi dari Inspektorat Daerah maupun Kementerian PANRB.

2. Faktor Kendala/Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Masih terdapat ketebatasan kapasitas SDM dalam memahami cascading kinerja dan penyusunan indikator yang benar-benar outcome-oriented.
- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-reporting dalam mendukung integrasi data kinerja.

- Ketidakkonsistenan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pada beberapa sub kegiatan.
- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

3. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk mengatasi kendala dan meningkatkan capaian Nilai AKIP, telah dilakukan beberapa langkah strategis antara lain:

- Peningkatan Kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan terkait implementasi SAKIP dan penyusunan dokumen kinerja.
- Penguatan proses cascading kinerja agar selaras dari level perangkat daerah hingga individu.
- Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP yaitu :

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	A (89,31)	BB (79,46)*	107	3.612.953.286	3.342.339.162	92,51	7,49

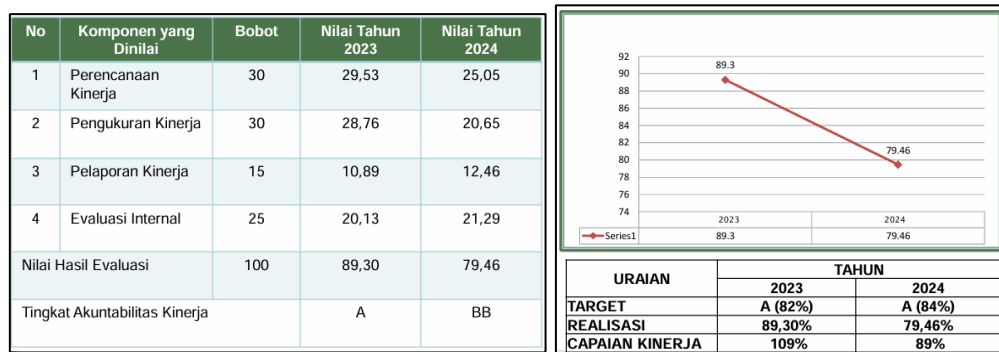
Catatan: *) Data Capaian Tahun 2024

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.3.612.953.286} \times 92,51\%) - 3.342.339.162}{\text{Rp.3.612.953.286} \times 92,51\%} \times 100\% = 7,49\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7,49%.



Gambar 3.1 Perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah A (89,31), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebesar BB (79,46) serta untuk capaian kinerja sebesar 89%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 20% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar A (89,30). Penurunan nilai ini didorong dengan adanya penurunan pada 2 (dua) komponen yang dinilai dari total 4 (empat) komponen yang dinilai yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja dari 29,53 menurun menjadi 25,05
- 2) Pengukuran kinerja dari 28,76 menurun menjadi 20,65

Ada 2 (dua) komponen yang dinilai dari total 4 (empat) komponen yang dinilai mengalami peningkatan yaitu:

- 1) Pelaporan kinerja dari 10,89 menurun menjadi 12,45

2) Evaluasi internal dari 20,13 menurun menjadi 21,29

g) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini ada 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

b) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Mebel

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.059.643.941 atau 97,26% dari total anggaran sebesar Rp3.145.900.220 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,74%.

SASARAN STRATEGIS 2

“Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah”

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa satuan	97	92	95
	Rata-rata capaian (%)					95



Gambar 3.2 Sertifikat Penghargaan Inovasi Tahun 2025

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai 92 dari target 97 atau tingkat capaiannya mencapai 95%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (*approve*) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “**Klinik LKPM**” dengan predikat **Sangat Inovatif**. Inovasi dibuat bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha Non UMK apabila mengalami kendala dalam menyampaikan pelaporan realisasi investasi pada OSS LKPM. Untuk penyampaian pelaporan LKPM dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) kali atau pelaporan secara triwulan. Untuk triwulan I dilaporkan pada awal bulan April, triwulan II pada awal bulan Juli, triwulan III pada awal bulan Oktober dan triwulan IV pada awal bulan Januari tahun berikutnya.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini:

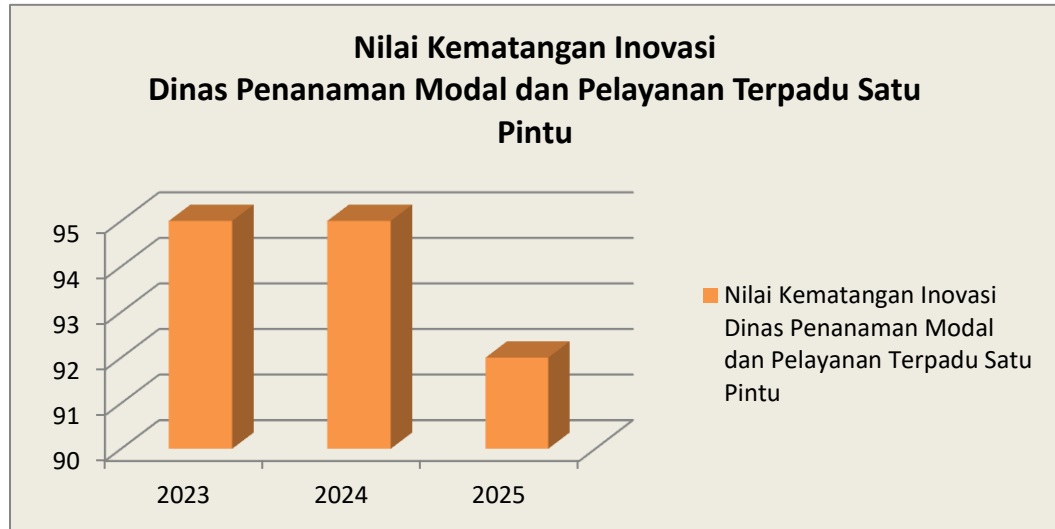
Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	95	95	92

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,16%. Meskipun terjadi penurunan, capaian tahun 2025 masih berada pada kategori kinerja sangat baik. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Kematangan

Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.3
Tren Capaian Kinerja pada Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025



c. **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan Inovasi DPMPTSP	92	100	95	Akan tercapai (sama atau

						lebih dari 100%)
--	--	--	--	--	--	------------------

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja nilai kematangan inovasi DPMPTSP tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik/khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah yaitu :

1. Faktor Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah.
- Bertambahnya jumlah inovasi yang dikembangkan serta meningkatnya kualitas inovasi yang dihasilkan.
- Tersedianya tim atau kelompok kerja inovasi yang secara aktif mengelola, mendokumentasikan, dan mengembangkan inovasi.
- Pemanfaatan aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IGA) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dalam proses pelaporan dan penilaian inovasi.

2. Faktor Kendala/Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap konsep inovasi yang memenuhi kriteria penilaian IGA.

- Inovasi yang dikembangkan belum sepenuhnya berkelanjutan atau belum memberikan dampak yang signifikan.
- Keterbatasan anggaran dalam pengembangan dan replikasi inovasi.

3. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- Meningkatkan kualitas dokumentasi inovasi, termasuk penyediaan eviden pendukung yang lengkap dan terstandar.
- Mendorong keberlanjutan dan replikasi inovasi yang telah berhasil diterapkan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan inovasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai kematangan inovasi DPMPTSP	100	95	95	93.390.600	92.475.200	95	4,23
---	--------------------------------------	----------------------------------	-----	----	----	------------	------------	----	------

Perhitungan Tingkat Efisiensi Sumber Daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.93.390.600} \times 95\%) - 92.475.200}{\text{Rp.93.390.600} \times 95\%} \times 100\% = 4,23\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,23%.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.92.475.200, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,98%.

SASARAN STRATEGIS 3

“Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN”

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN indikator kinerjanya yaitu Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rupiah	925 M	930.425.963.348	101
Rata-rata capaian (%)						101

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa realisasi investasi mencapai sebesar Rp930 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp925 miliar. Dengan capaian sebesar 101%, kinerja investasi pada periode ini dapat dinilai sangat baik karena target yang direncanakan tidak hanya tercapai, tetapi juga sedikit terlampaui.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	949.436.439.540	907.066.439.129	930.425.963.348

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Investasi Swasta dan Masyarakat mengalami kenaikan dari capaian tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku yang sudah mulai sadar dalam penyampaian laporan LKPM terutama bagi pelaku usaha Non UMK yang wajib menyampaikan laporan LKPM.

Pada grafik di bawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Tahun 2025 sebagai berikut:

Grafik 3.4
Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Tahun 2023 s.d. 2025



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	101%	675M	100%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai investasi swasta dan masyarakat yaitu :

1. Faktor Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- Penyederhanaan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.
- Pelaksanaan kegiatan promosi investasi dan penyediaan informasi peluang usaha secara aktif kepada calon investor.

- Adanya pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam proses perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
 - Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di daerah, didukung oleh potensi ekonomi dan peluang usaha yang menjanjikan.
2. Faktor Kendala/Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja
- Masih terdapat pelaku usaha yang belum tertib atau terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi investasi melalui LKPM.
 - Keterbatasan data dan informasi investasi yang terupdate secara real time.
 - Kendala teknis dalam penggunaan aplikasi OSS Pengawasan (LKPM), baik dari sisi pengguna maupun sistem.
 - Fluktuasi kondisi ekonomi nasional maupun global yang mempengaruhi keputusan investasi
3. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- Meningkatkan kegiatan promosi investasi melalui berbagai media dan forum investasi, baik secara langsung maupun digital.
- Melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM secara berkala.
- Mengoptimalkan pelayanan perizinan terpadu dan percepatan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi investasi serta kendala yang dihadapi pelaku usaha.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi (Rp)	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	925 M	930.425.963.348	101	16.300.950	15.166.900	93,04	7,88

Perhitungan Tingkat Efisiensi Sumber Daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.16.300.950} \times 101\%) - 15.166.900}{\text{Rp.16.300.950} \times 101\%} \times 100\% = 7,88\%.$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7,88%.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran meningkatnya Investasi PMA dan PMDN ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut, yaitu:

- 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - o Pengawasan Penanaman Modal

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat adalah sebesar Rp.15.166.900 atau 93,04% dari total anggaran sebesar Rp.16.300.950 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7%.

SASARAN STRATEGIS 4
“Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik”

- a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Responden	91% (350 responden)	350 responden	91,68
Rata-rata Capaian						91,68

Dari tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sebesar 91%.

- b. **Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

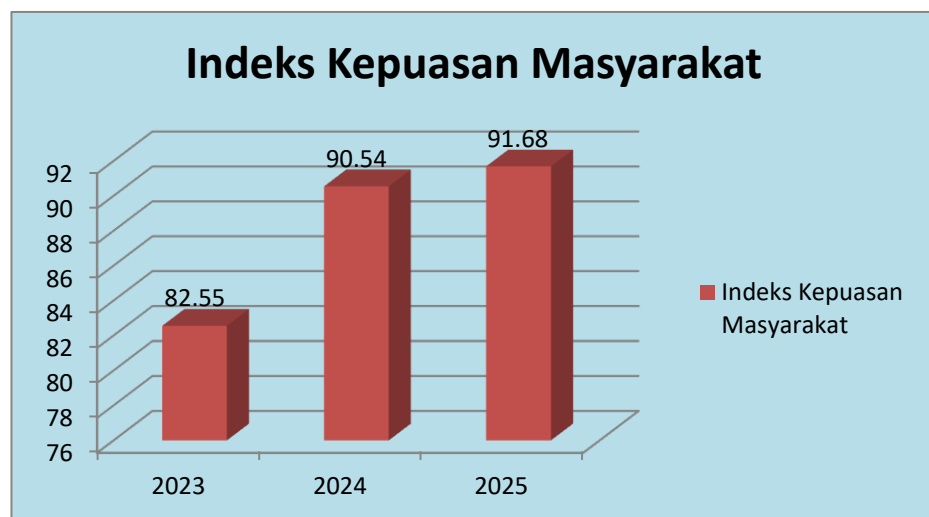
Tabel 3.17
 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	82,55	90,54	91,68

Dari tabel 3.17 di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMPTSP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan bahwa setiap tahun DPMPTSP selalu berbenah dan memperbaiki layanan dan pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha/masyarakat sudah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

Pada grafik di bawah ini dapat dilihat tren capaian kinerja pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.5
Tren Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 s.d 2025



Dari grafik 3.5 dapat dijelaskan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 s.d 2025 cenderung menunjukkan tren positif, artinya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam hal pelayanan.

- c. **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dinas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	90,54	85	91,68	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, dapat dilihat pada tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.19
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,54	A

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja

meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik, diantaranya adalah:

1. Faktor Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keramahan petugas pelayanan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman, sistem antrean, serta fasilitas informasi yang jelas.
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sehingga menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelayanan.
- Adanya komitmen pimpinan dan petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Faktor Kendala/Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- Keterbatasan jumlah SDM pelayanan dibandingkan dengan jumlah pemohon yang dilayani.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Tindak lanjut atas masukan/keluhan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan secara cepat dan terukur

3. Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan melalui pelatihan pelayanan prima dan etika pelayanan publik.
- Penambahan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat.

- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi, termasuk digitalisasi layanan dan survei kepuasan masyarakat.
- Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.20
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat efisiensi sumber daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	91% (350 responden)	350 responden	91,68	49.501.398	47.202.356	95,36	

Perhitungan Tingkat Efisiensi Sumber Daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp.49.501.398} \times 91,68\%) - 47.202.356}{\text{Rp.49.501.398} \times 91,68\%} \times 100\% = 4\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4%.

- g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran meningkatnya Investasi PMA dan PMDN ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - o Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - o Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - o Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar Rp.47.202.356 atau 95,36% dari total anggaran sebesar Rp.49.501.398 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5%.

3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 pada tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Awal	Jumlah Anggaran PAPBD	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan	
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.376.923.116	3.269.521.118	3.172.280.847	3.172.280.847	97,23
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.646.660.669	2.561.254.821	2.512.126.844	2.512.126.844	98,08
	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.660.669	2.561.254.821	2.512.126.844	2.512.126.844	98,08
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	<i>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.588.052.354	2.480.700.356	2.426.928.786	2.426.928.786	98,07
	a. Belanja Operasi	2.588.052.354	2.480.700.356	2.426.928.786	2.426.928.786	98,07
	<i>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	65.142.315	80.554.465	79.344.858	79.344.858	98,50
	a. Belanja honorarium	42.720.000	55.186.000	54.612.000	54.612.000	98,96
	b. Belanja Operasi	22.422.315	25.368.465	24.722.858	24.722.858	97,46
	2 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17.499.708	19.630.708	18.908.458	18.908.458	96,32

	<i>Sub Kegiatan</i>	17.499.708	19.630.708	18.908.458	18.908.458	96,32
	<i>Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i>	17.499.708	19.630.708	18.908.458	18.908.458	96,32
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.145.401	150.235.492	144.325.543	144.325.543	96,07
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	<i>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.615.889	10.445.839	8.985.450	8.985.450	86,02
	a. Belanja Operasi	10.615.889	10.445.839	8.985.450	8.985.450	86,02
	<i>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	8.136.630	1.218.000	1.218.000	1.143.300	93,87
	a. Belanja Modal	8.136.630	1.218.000	1.218.000	1.143.300	93,87
	<i>3. Penyediaan Bahan Logistik kantor</i>	21.175.549	19.159.739	18.036.327	18.036.327	94,14
	a. Belanja Operasi	21.175.549	19.159.739	18.036.327	18.036.327	94,14
	<i>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	10.104.833	15.128.314	12.825.266	12.825.266	84,78
	a. Belanja Operasi	10.104.833	15.128.314	12.825.266	12.825.266	84,78
	<i>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100

	a. Belanja Operasi	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100
	<i>6. Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	11.792.000	7.293.000	7.260.000	7.260.000	99,55
	a. Belanja Operasi	11.792.000	7.293.000	7.260.000	7.260.000	99,55
	<i>7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	161.720.500	93.390.600	92.475.200	92.475.200	99,02
	a. Belanja Operasi	161.720.500	93.390.600	92.475.200	92.475.200	99,02
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.937.168	308.213.417	284.875.936	284.875.936	92,43
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	<i>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	102.000.000	106.400.000	84.861.791	84.542.291	79,76
	a. Belanja Operasi	102.000.000	106.400.000	84.861.791	84.542.291	79,76
	<i>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	187.937.168	201.813.417	200.014.145	200.014.145	99,11
	a. Belanja Operasi	187.937.168	201.813.417	200.014.145	200.014.145	99,11
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.590.382	106.565.782	99.407.160	99.407.160	93,28
	<i>Sub Kegiatan</i>					

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.440.382	84.455.782	77.357.160	77.357.160	91,59
	a. Belanja Operasi	82.440.382	84.455.782	77.357.160	77.357.160	91,59
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.150.000	17.150.000	17.150.000	17.150.000	100
	a. Belanja Operasi		17.150.000	17.150.000	17.150.000	100
II	PROG. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	36.352.250	27.818.550	27.818.550	26.785.350	96,29
	1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.352.250	27.818.550	26.785.350	26.785.350	99,30
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.352.250	27.818.550	26.785.350	26.785.350	99,30
	a. Belanja Operasi	36.352.250	27.818.550	26.785.350	26.785.350	99,30
III	PROG. Pelayanan Penanaman Modal	76.052.848	49.501.398	49.501.398	47.202.356	95,36
	1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	76.052.848	49.501.398	49.501.398	47.202.356	95,36
	<i>Sub Kegiatan</i>					

	1	54.879.035	49.501.398	47.202.356	47.202.356	95,36
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	a. Belanja Honorarium	12.100.000	9.393.000	9.393.000	9.393.000	100
	b. Belanja Operasi	42.779.035	40.108.398	37.809.356	37.809.356	94,27
	2	9.472.840	4.443.920	4.392.542	4.392.542	98,84
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
	a. Belanja Operasi	9.472.840	4.443.920	4.392.542	4.392.542	98,84
	3	11.700.973	7.250.705	5.133.134	5.133.134	70,79
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko					
	a. Belanja Operasi	11.700.973	7.250.705	5.133.134	5.133.134	70,79
IV	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	23.296.950	16.300.950	15.166.900	15.166.900	93,04
	Kegiatan engendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	23.296.950	16.300.950	15.166.900	15.166.900	93,04
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	1 Pengawasan Penanaman Modal	23.296.950	16.300.950	15.166.900	15.166.900	93,04
	a.. Belanja Operasi	23.296.950	16.300.950	15.166.900	15.166.900	93,04

V	PROG. Promosi Penanaman Modal	134.481.900	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	134.481.900	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	<i>Sub Kegiatan</i>					
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	a. Belanja Operasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
JUMLAH		3.376.923.116	3.269.521.118	3.172.280.847	3.172.280.847	97,23

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sasaran yang mencapai target adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
Telah mencapai target yang ditentukan dapat dilihat dari hasil nilai Hasil evaluasi Kinerja Perangkat yang mana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
Telah mencapai target yang ditentukan dapat dilihat dari hasil nilai Kualitas Inovasi Perangkat Daerah yang mana dari tahun 2022 sampai dengan 2024 telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik

Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
Peningkatan investasi swasta dan masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat Pesisir Selatan yang terbuka kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan capaian realisasi yang cenderung meningkat dari target yang telah ditentukan

I. Sasaran yang tidak mencapai target

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 semua sasaran yang ditargetkan telah mencapai target

- II. Indikator yang Mencapai Target
 - a) Nilai AKIP Perangkat Daerah
 - b) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat
 - d) Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat
- III. Indikator yang tidak Mencapai Target
 - Semua indikator telah mencapai target

Realisasi Anggaran yang Mencapai Target

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 memiliki 5 Program, 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Semua sub kegiatan yang telah dilaksanakan telah mencapai target realisasi anggaran.

Realisasi Anggaran yang tidak Mencapai Target

Tidak ada realisasi anggaran yang tidak mencapai target.

4.2. Saran

- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait atau pemangku kepentingan baik pusat maupun provinsi dalam melaksanakan program-program pembangunan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Meningkatkan sumber daya manusia serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.